

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN  
(STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**CAHYA NAIMAH SYAHADATI**

**NIM. 190802070**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Naimah Syahadati

NIM : 190802070

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Februari 2002

Alamat : Jln. Usman Ahmad No 2 Dusun Ujong Meunasah, Lhong Cut, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,



CAHYA NAIMAH SYAHADATI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN (STUDI**  
**KASUS DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar - Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**CAHYA NAIMAH SYAHADATI**

NIM. 190802070

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Disetujui Untuk Dimunafasyahkan Oleh :

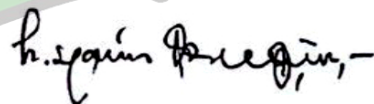
Pembimbing I



**Cut Zamharira, S.IP, M.AP**

NIDN. 2017117904

Pembimbing II



**Hijrah Saputra, S.Fill., M.Sos.**

NIP. 199007212020121016

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN  
(STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang: Rabu, 20 Desember 2023

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.  
NIDN. 2017117904

Sekretaris



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.  
NIP. 199007212020121016

Penguji I



Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Penguji II



Arif Akbar, M.A.  
NIP. 199110242022031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Salah satu masalah sosial di Kota Banda Aceh adalah adanya keberadaan anak jalanan. Masalah-masalah yang diakibatkan anak jalanan ini cukup memprihatinkan dan menimbulkan kecemasan di dalam lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, dan apa saja faktor penghambat dalam pembinaan anak jalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya sebagian indikator seperti tepat sasaran dalam program, sumber daya manusia dan fasilitas memadai, adanya kerjasama, karakteristik agen pelaksana yang sudah sesuai dengan aturan, disposisi masih harus adanya upaya lebih dari pemerintah dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat mempengaruhi. Namun dalam pembinaan anak jalanan terdapat faktor penghambat seperti keluarga atau orang tua dan mental yang sulit di rubah.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh”. Tidak lupa pula Shalawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Cut Zamharira, S.IP, M.AP. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan,

memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai.

5. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Bapak Zakaria dan Ibu Agustina atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Semoga ibu dan ayah sehat dan bahagia selalu
8. Saudara kandungku, Karina Sukma Jaya dan Nazar Habibillah Kusuma, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat saya di perkuliahan, Saila, Suci dan lainnya. Juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara
10. Cahya Naimah Syahadati, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan. Yashh I got it!!

## DAFTAR ISI

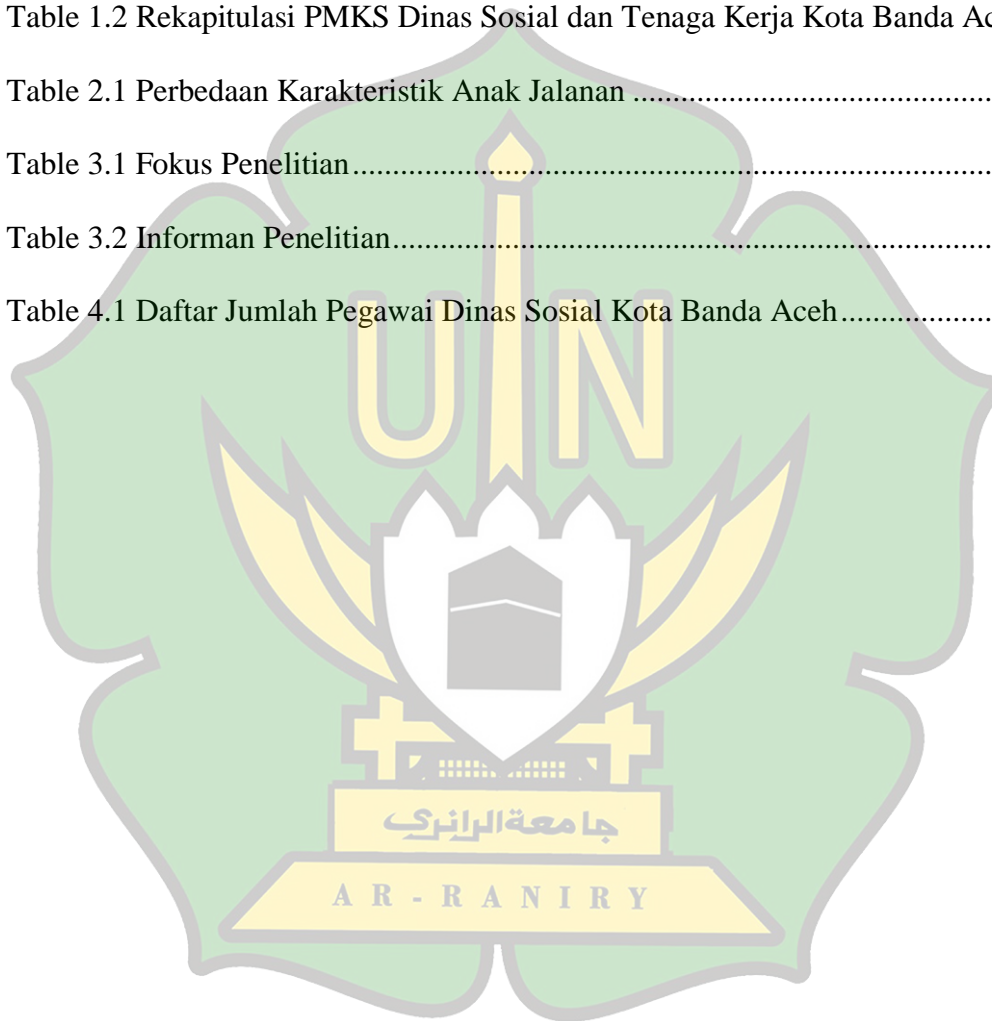
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Penjelasan Ilmiah .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Implementasi Kebijakan .....	13
2.3. Pembinaan.....	19
2.4. Anak Jalanan.....	21
2.5. Kerangka Berfikir .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>



3.1. Pendekatan Penelitian .....	25
3.2. Fokus Penelitian .....	26
3.3. Lokasi Penelitian .....	26
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5. Informan Penelitian .....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
3.8. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Profil Lembaga Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	33
4.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	33
4.1.2 Visi Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh .....	34
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh ...	35
4.1.4 Struktur Organisasi .....	37
4.2. Hasil Penelitian .....	45
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan.....	45
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Laporan Rekapitan Kasus Bidang Rehabilitasi Sosial .....	4
Table 1.2 Rekapitulasi PMKS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh....	7
Table 2.1 Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan .....	23
Table 3.1 Fokus Penelitian.....	26
Table 3.2 Informan Penelitian.....	28
Table 4.1 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	48



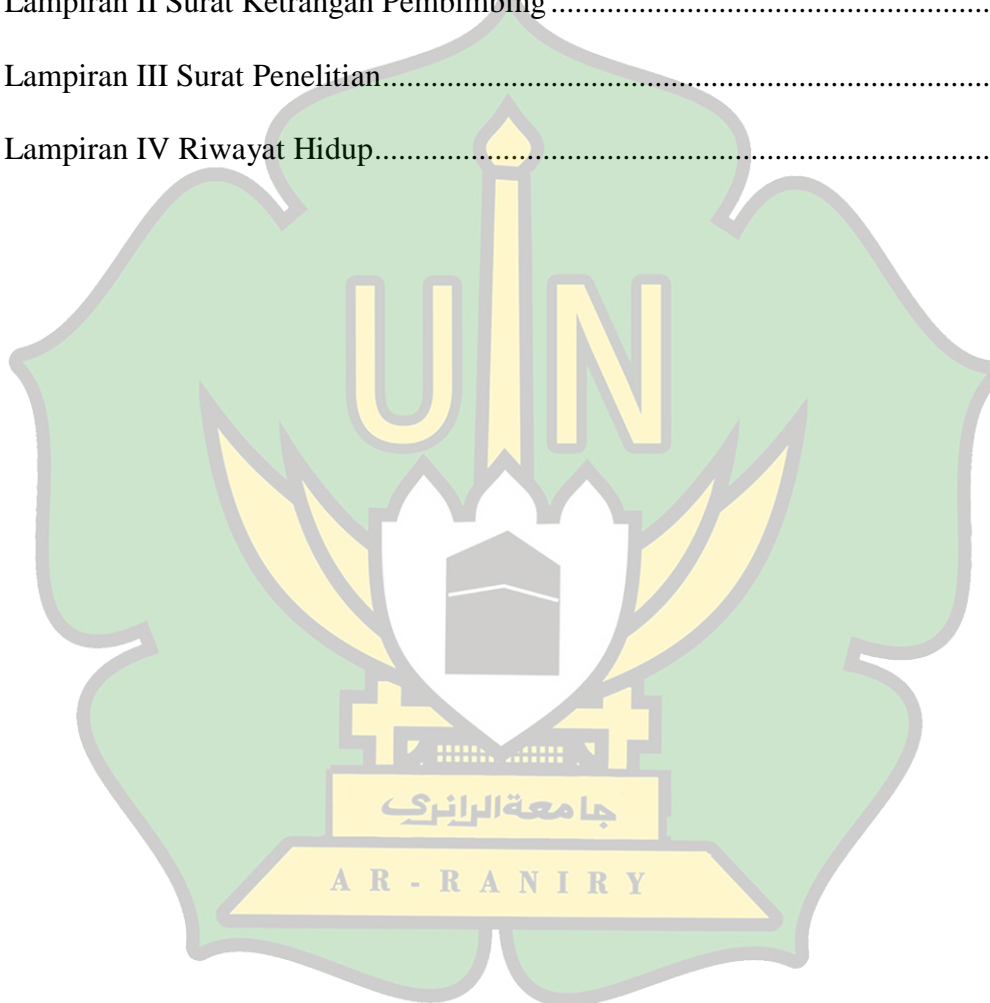
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	26
4.1 Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	33
4.2 Struktur Organisasi Kota Banda Aceh.....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara.....	4
Lampiran II Surat Keterangan Pembimbing.....	7
Lampiran III Surat Penelitian.....	8
Lampiran IV Riwayat Hidup.....	9



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang koordinasi penanggulangan anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang anak jalanan. Koordinasi penanggulangan anak jalanan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui satu tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Keputusan Presiden mempunyai fungsi dalam membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijakan pemerintah dibidang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

---

<sup>1</sup> UU No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Jika dilihat di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin.<sup>2</sup>

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan-tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan.<sup>3</sup>

Dalam setiap implementasi kebijakan, tentu ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa membuat implementasi kebijakan berhasil maupun gagal. Apabila faktor tersebut baik maka suatu kebijakan akan terimplementasi dengan baik. Sebaliknya apabila faktor tersebut buruk, maka suatu kebijakan justru tidak sesuai target dan akan gagal diimplementasi.<sup>4</sup>

Salah satu masalah sosial di Kota Banda Aceh adalah anak jalanan. Masalah-masalah yang diakibatkan Anak Jalanan ini cukup memprihatinkan dan menimbulkan kecemasan di dalam lingkungan masyarakat. Seperti kurangnya pengawasan dan perlindungan orang tua dikarenakan faktor-faktor ekonomi yang kurang bercukupan sehingga masa depan mereka terancam punah, yang

---

<sup>2</sup> Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh* (JIM: Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 4 November 2018)

<sup>3</sup> Gaffar Afan, 2009 *Politik Indonesia : Transisi Mneuju Demokrasi*, Cet. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm : 295

<sup>4</sup> Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 NO. 1 Thn, 2010

seharusnya mereka mendapatkan bimbingan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang baik di sekolah namun kenyataannya mereka hanya bisa bermimpi karena faktor ekonomi yang membuat mereka harus bekerja, bahkan membantu memberikan sebagian penghasilannya kepada kedua orang tuanya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>6</sup> Macam-macam hak anak yang wajib dipenuhi orang tua ialah hak mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan, hak rekreasi, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan makanan, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak mendapatkan kesamaan.

Menurut hasil pengamatan penulis di Banda Aceh sendiri anak jalanan bekerja sebagai berjualan di lampu lalu lintas dan meminta sumbangan. Lokasi anak jalanan ini biasanya di Lampu Lalu Lintas Simpang 5, Pasar Aceh, Simpang Jambo Tape, Terminal, warung kopi dan lain-lain. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut diberikan kepada orang tua atau untuk diri mereka sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zuhratul Khaira Ulfia, "Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh"

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Observasi awal pada bulan april 2023

**Tabel 1.1**  
**Laporan Rekapitan Kasus Bidang Rehabilitasi Sosial**  
**Januari-Desember Tahun 2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Anak Terlantar	21
2	Anak Korban Kekerasan	9
3	Anak Korban Pelecehan Sosial	11
4	Anak Jalanan	25
5	ABH	70
6	Anak Jalanan	24
7	Pengasuhan	12
8	Anak Korban Pelecehan Seksual	11
9	Reunifikasi keluarga anak terlantar	0
10	Pemakaman anak terlantar	21
11	Kebutuhan sandang anak terlantar	21
12	Layanan pendidikan dan kesehatan dasar anak terlantar	22
13	Pembuatan NIK, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan KIA Anak Terlantar	3
14	Pengaduan layanan dan data anak terlantar	21
15	Layanan dan rujukan anak terlantar	10
16	Penelusuran anak jalanan	21
17	Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara	21
18	Anak terlantar yang terjangkau	21
19	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rujukan	10
	<b>Total</b>	<b>354</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh*

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial telah memberikan pembinaan terhadap 186 tuna sosial baik itu gelandangan dan pengemis hingga anak jalanan dalam kurun waktu januari hingga September 2022. Adapun jumlah 186 tuna sosial yang telah dilakukan pembinaan tersebut yakni pada triwulan pertama 2022 (Januari-Maret) sebanyak 84 orang. Kemudian, triwulan kedua (April-Juni) 30 orang dan triwulan ketiga (Juli-September) 72 orang.

Anak merupakan generasi, asset, dan pemilik masa depan bangsa dan Negara. Oleh karenanya kemajuan bangsa/Negara ditentukan oleh pembinaannya



sejak dini.<sup>8</sup> Aktivitas anak-anak jalanan diantaranya sebagai pengamen, berjualan. Mereka beroperasi di tempat keramaian atau umumnya berada di perempatan jalan. Resiko yang dapat diidentifikasi antara lain menjadi korban kekerasan, dan kurang gizi.

Tugas utama seorang anak adalah belajar, bukan bekerja atau menghasilkan uang. Orang tuanya yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya agar bisa tumbuh dan berkembang, jika orangtua tidak ada atau tidak mampu dalam menjaga anak maka ada masyarakat tradisional, komunitas dimana anak tinggal biasanya yang akan mengambil alih tanggung jawab orang tua (perwakilan zakat, dan lain-lain), dalam kehidupan bernegara, pemerintah yang mendapat mandat untuk mengambil alih tanggung jawab bila orang tua tidak ada atau tidak mampu.

Maraknya permasalahan anak jalanan yang sangat memprihatinkan di Kota Banda Aceh saat ini sehingga perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah dan dinas terkait menangani permasalahan anak jalanan seperti Dinas Sosial.<sup>9</sup> Namun upaya dalam menangani masalah anak jalanan serta proses penegakan hukumnya masih belum maksimal, hal ini dapat terlihat masih banyaknya anak jalanan, padahal berbagai aturan mengenai Pemerintah Kota Banda Aceh sudah cukup jelas “bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

---

<sup>8</sup> Hambali, “Hak Anak Atas Pendidikan; Pemenuhan Hak dan Solusinya (Dimulai dari pendidikan Keluarga dan aktivitas Sederhana)”, Jurnal Paradigma, XII (24) Juli-Desember 2007, IKIP Budi Utomo Malang, hlm. 153

<sup>9</sup> Pasal 46 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013

Pelaksanaan dalam konteks perlindungan anak tetap perlu dikawal oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah tidak mudah dilaksanakan.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.<sup>11</sup> Adapun lembaga yang berfungsi menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas Sosial adanya Mencakup kegiatan melalui respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak.

Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, maka pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh perlu mengadakan program pembinaan anak jalanan, dengan adanya program tersebut akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan. Sudah ada beberapa peraturan, kebijakan, maupun program dalam menangani anak terlantar atau anak jalanan. sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 huruf (b) menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Wilayahnya/bersifat local, termasuk tugas pembantuan. Pasal 9 huruf (f) menyatakan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pemerintah

---

<sup>10</sup> M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Halal-Haram dalam Transaksi Keuangan dan Tujuan Zakat Harta dalam Islam*, (Jakarta: Modern Guide, 2015), hlm. 8

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20

Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial di wilayah kabupaten/kota.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh**

No	PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	174
2	Anak Terlantar	120
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	190
4	Anak jalanan	60
5	Anak Disabilitas	140
6	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	10
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	12
Total		706

Sumber: Fitriliana, dkk. "Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak), *Journal of Law and Government Science* Vol. 8 No. 2 Oktober 2022.

Dari tabel diatas terlihat banyaknya jumlah anak yang tergolong ke dalam permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh merupakan pusatnya pemerintahan Aceh sehingga semua masyarakat berbondong-bondong mencari nafkah di Kota Banda Aceh tanpa mempersiapkan skill kemampuan mereka dan perencanaan tempat tinggal. Akibatnya muncullah masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, emperan toko dan lainnya yang berakibat juga terhadap keluarga

dan anak mereka menjadi tidak terurus bahkan menjadi anak jalanan dan gelandangan sehingga anak tersebut tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

Untuk melaksanakan Qanun Aceh Tentang Kesejahteraan Sosial, maka adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Pasal 7 menjelaskan bahwa “Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota”. Kemudian berdasarkan Pasal 8 “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Anak jalanan juga merupakan generasi muda yang seharusnya disiapkan untuk mengisi pembangunan dan berperan sebagai tulang punggung keberlangsungan bangsa. Bila generasi muda tidak bisa diandalkan dikarenakan mereka hidup sebagai anak jalanan, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan terganggu.

Dari uraian di atas, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Banda Aceh”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ni adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya anak yang berkeliaran di pusat Kota Banda Aceh
2. Masih banyaknya orang tua yang tidak mampu dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
2. Faktor penghambat apa saja dalam pembinaan anak jalanan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?

### **1.4. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan di Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja dalam pembinaan anak jalanan

### 1.5. Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah:

- a) Kegunaan praktis, bagi lembaga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga yang bersangkutan.
- b) Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat tambahan praktis (penerapan teori) bagi ilmu pengetahuan yang bisa digunakan sebagai informasi bagi yang membutuhkan.

### 1.6. Penjelasan Ilmiah

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setiap sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>12</sup>

#### 2. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan atas berbagai sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia: Transisi Manuju Demokrasi, Cer. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm: 295

<sup>13</sup> Sutrisno, Edy, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 132

### 3. Anak Jalanan

anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya di jalanan. mereka bergaul, berkelompok, dan mencari nafkah di jalanan, dengan cara yang baik seperti mengemis, meminta, ataupun mengamen. Sebagian mencari nafkah atau mengais rejeki dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Bapeda Kota Cirebon-Unicef, 2002

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhratul Khaira Ulfia (2022) dengan judul “Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”<sup>15</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah efektif meskipun terdapat beberapa hambatan dan beberapa yang harus diperhatikan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe dalam menjalankan program pembinaan terhadap anak jalanan. dengan berjalannya program Rumoh Seujahtera ini diharapkan agar setiap hambatan segera diperbaiki, seperti segera melengkapi fasilitas yang kurang dan juga menambah jumlah pengasuh sesuai dengan jumlah anak yang dibina, sehingga nantinya kegiatan berjalan optimal. Perbedaan terdapat pada lokasi yang dimana dalam penelitian ini juga langsung terjun ke UPTD, tidak melakukan penelitian pada Dinas Sosial. Juga terdapat perbedaan pada teori yang digunakan.

---

<sup>15</sup> Zuhratul Khaira Ulfia. (2022). Judul Skripsi “Efektivitas Program Pembinaan Anak Jalanan di UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe Kabpaten Aceh Besar Provinsi Aceh”. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia



Penelitian yang dilakukan oleh Andi Wahyudi, Jaelan Usman, Ansyari Mone(2021) yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”<sup>16</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pembinaan pencegahan dilakukan dengan kegiatan patrol setiap hari secara rutin oleh Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC), aspek pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui alasan anak turun ke jalanan dengan cara identifikasi atau assessment di RSPA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), dan aspek pembinaan rehabilitasi anak jalanan ada kerja sama Dinas Sosial Kota Makassar dengan Yayasan Kelompok Penyalahgunaan Narkoba (YKP2N). perbedaan terdapat pada lokasi yang berbeda dan focus pada penelitian ini lebih kepada peran dinas sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Aminah Yan(2021) yang berjudul “Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalan Di Kota Bandar Lampung”<sup>17</sup> hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukan keterbatasan SDM, dana, sarana prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih bervariasi. Sehingga Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan anak jalanan yaitu tidak adanya panti asuhan yang dimiliki pemerintah kota Bandar Lampung sehingga biaya yang dikeluarkan oleh

---

<sup>16</sup> Andi wahyudi. (2021). Judul Skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”. Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>17</sup> Ani Aminah Yan. (2021). Judul “Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Dinas Sosial cukup besar. Perbedaan terdapat pada lokasi yang berbeda dan juga focus penelitian ini lebih kepada bagaimana strategi dinas sosial lalu juga terdapat perbedaan pada teori yang digunakan

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Hidayah(2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”<sup>18</sup> hasil penelitian ini dikatakan belum berhasil, masih adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, walaupun komunikasi antar instansi sudah terlaksana cukup baik, namun faktor lingkungan ekonomi, sosial politik masyarakat belum berperan aktif. Masih banyak para penyandang penyakit sosial sudah dibina kembali ke jalanan. Dan para pelaksana memiliki koordinasi integritas dan sinkronisasi baik secara vertical atau horizontal walaupun para pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian dimana dalam penelitian ini tidak hanya anak jalanan menjadi fokusnya tetapi gelandangan, pengemis dan pengamen termasuk kedalam fokusnya.

## **2.2. Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setiap sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka

---

<sup>18</sup> Endang Sri Hidayah. (2020). Judul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>19</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.<sup>20</sup>

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuannya yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>21</sup>

Menurut Meter dan Horn terdapat enam pokok yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni:<sup>22</sup>

a. Standar dan sasaran kebijakan

---

<sup>19</sup> Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia: Transisi Manuju Demokrasi, Cer. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm: 295

<sup>20</sup> Nugroho, Riant, 2004. Publik Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia. Hlm 158-160

<sup>21</sup> Agustino. 2006. Imlementasi Kebijakan Publik model Van Meter dan Van Horn: The Policy.

<sup>22</sup> AG. Subarsono, 2005, "Analisis Kebijakan Publik", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan udah menimbulkan konflik di antara agen pelaksana. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut

b. Sumberdaya

Dalam hal implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik human resources maupun non human resources. Atau sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana dan perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaannya. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Hubungan antar organisasi/komunikasi

Perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan atau program tercapai. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara

akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil.

d. Karakteristik agen pelaksanaan yang mencakup struktur birokrasi

Norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

e. Kondisi sosial politik dan ekonomi

Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Hal ini sangat perlu diperhatikan guna menilai bagaimana kinerja implementasi kebijakan sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan public. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

f. Disposisi implementor

Adanya respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan Intensitas disposisi implementor. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>23</sup>

### 2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Penyusunan Agenda

---

<sup>23</sup> Winarno, Budi, 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo Hlm. 102

<sup>24</sup> Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan bahkan ada pula masalah karena berbagai alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan.

c. Adopsi Kebijakan

Dari banyaknya alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang telah di ambil ini sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

## **2.3. Pembinaan**

### **2.3.1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Istilah pembinaan atau berarti “pendidikan” yang merupakan pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa. Selanjutnya pembinaan atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.<sup>25</sup>

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan atas berbagai sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>26</sup>

Menurut Drs. Miftha Thoha, MPA mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan proses hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Hlm. 152

<sup>26</sup> Sutrisno, Edy, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 132



menunjukkan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan dan evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan bisa berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>27</sup>

Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.<sup>28</sup>

### 2.3.2. Proses Pembinaan

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, ang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti dari pada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Menurut pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu:

#### 1. Teknik Adaptif

Bersifat relative dan terfragmentasi serta fleksibel, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku dalam menghadapi suatu hambatan.

#### 2. Teknik Perencanaan

<sup>27</sup> Miftha Thoha, Pembinaan organisasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm.

<sup>28</sup> E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004)

Memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. teknik ini mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi.

### 3. Teknik Sistematis dan Terstruktur

Berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

### 4. Teknik Inkrementalisme Logis

Teknik ini perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sarannya.

## **2.4. Anak Jalanan**

### 2.4.1. Pengertian Anak jalanan

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum lainnya. Anak jalanan adalah anak yang berusia lima sampai dengan delapan belas tahun (5-18 tahun). Sosok anak jalanan bermunculan di kota-kota, baik itu di emper-emper toko, stasiun, terminal, pasar, tempat wisata, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh,

berlindung sekaligus mencari kehidupan, meskipun ada yang masih tinggal dengan orangtua atau keluarganya.<sup>29</sup>

Konvensi Internasional menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya dijalanan. mereka bergaul, berkelompok, dan mencari nafkah dijalanan, dengan cara yang baik seperti mengemis, meminta, ataupun mengamen. Sebagian mencari nafkah atau mengais rejeki dengan cara mencuri, memalak, dan mengedarkan obat terlarang.<sup>30</sup>

Marginal, rentan dan eksploitasi merupakan istilah-istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari perlakuan preman atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>31</sup>

#### 2.4.2. Karakteristik Anak Jalanan

Menurut Tata Sudrajat membagi anak jalanan dalam tiga kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu: Pertama, anak yang putus

<sup>29</sup> Departemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial*. (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 20

<sup>30</sup> Bapeda Kota Cirebon-Unicef, 2002

<sup>31</sup> Johan Narutama, *Peleksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karangayar*, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 19

hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan; kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan; ketiga, anak yang masih sekolah atau putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan.

Tata Sudrajat kemudian membuat beberapa faktor yang dapat membedakan karakteristik untuk masing-masing kelompok anak jalanan pada tabel

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Karakteristik Anak Jalanan**

Faktor Pembeda	Hidup di Jalanan	Bekerja di Jalanan	Rentan Menjadi Anak Jalanan
Lama dijalan	24 jam	7-12 jam	4-6 jam
Hubungan dengan keluarga	Putus hubungan	Tidak teratur pulang kerumah	Masih tinggal dengan orang tua
Tempat tinggal	Di jalanan	Mengontrak(bersama-sama)	Bersama keluarga
pendidikan	Tidak sekolah	Tidak sekolah	Masih sekolah

Sumber: Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang" Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014

### 2.4.3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan

Seiring dengan berkembangnya waktu, fenomena anak jalanan banyak terkait dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kecilnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendapatan orang tua yang sangat sedikit tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka untuk ikut bekerja.

Menurut Munandar, penyebab dari fenomena anak bekerja antara lain:<sup>32</sup>

- a. Dipaksa orang tua
- b. Tekanan ekonomi keluarga
- c. Diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa
- f. Asumsi dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain
- g. Pembenaran dari budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja.

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan dijalan antara lain:

- a. Kesulitan keuangan
- b. Tekanan kemiskinan
- c. Ketidakharmonisan rumah tangga
- d. Hubungan orang tua dan anak.

Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalan. menurut penjelasan baharsjah, kebanyakan

---

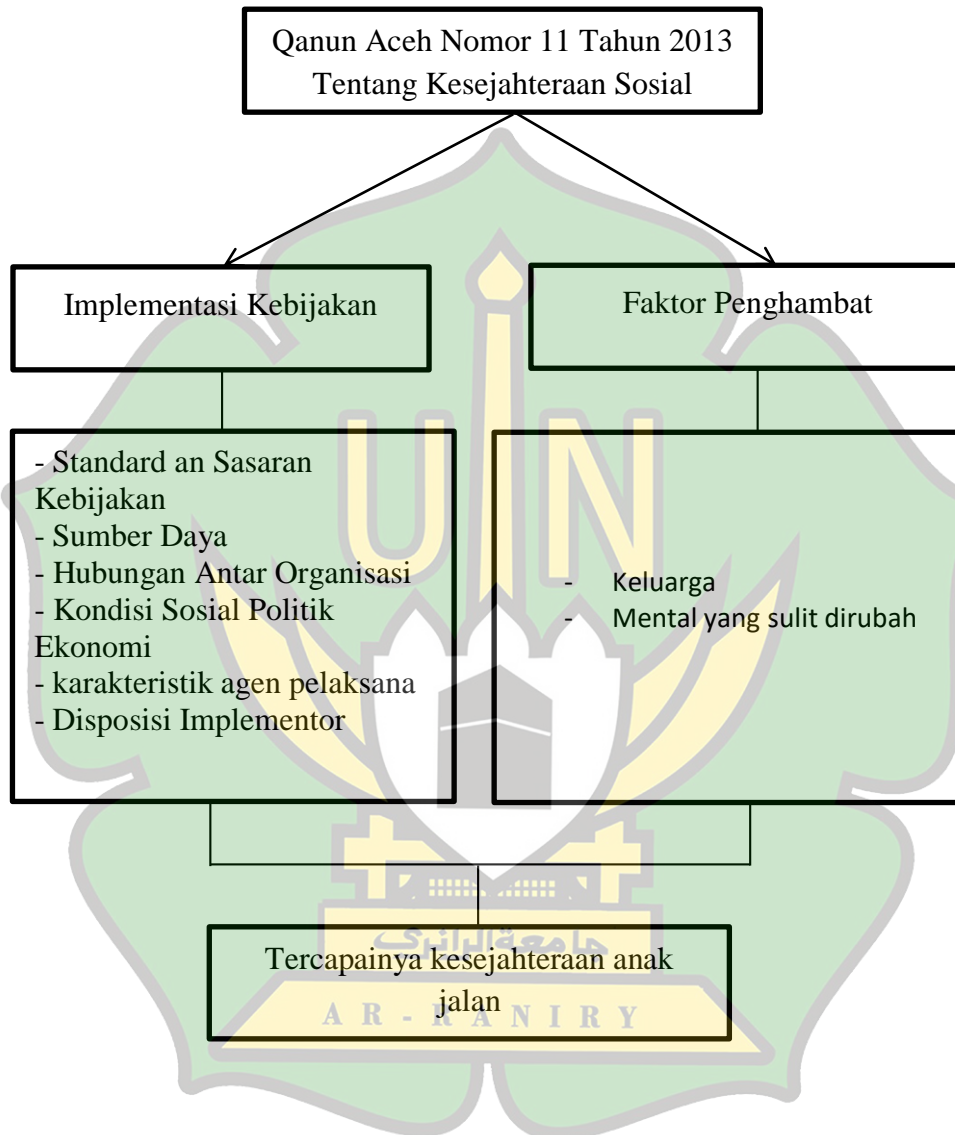
<sup>32</sup> Joan Freeman & Utami Munandar. 1996. Cerdas dan Cemerlang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan sendiri melainkan sekitar 60% mereka dipaksa oleh orang tua. Biasanya anak-anak yang memiliki keluarga, orang tua penjudi dan peminum alcohol, relative lebih rawan untuk memperoleh perlakuan yang salah. Pada kasus semacam ini, ibu sering kali menjadi objek perasaan ganda yang membingungkan. Ia dibutuhkan kasih dan perlindungannya, namun sekaligus dibenci karena perbuatannya



## 2.5. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>33</sup>

Adapun jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dari data yang diperoleh.<sup>34</sup>Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan secara mendalam. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ini.

---

<sup>33</sup> Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

<sup>34</sup> Achmadi, Abu dan Clolid Naboku. 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara



### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Banda Aceh, dan untuk melihat apa saja faktor penghambat apa saja dalam pembinaan anak jalanan

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Implementasi kebijakan dan Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat**

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Implementasi Kebijakan	a. Standar dan Sasaran b. Sumber Daya c. Hubungan Antar Organisasi d. Hubungan Sosial, Politik dan Ekonomi e. Karakteristik agen pelaksana f. Disposisi	Teori Van Metern dan van Horn
2	Faktor Penghambat	a. Keluarga b. Mental yang sulit di rubah	Sutaryono, 2015

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkapkan dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Kota Banda Aceh. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat keramaian seperti lampu lalu lintas SP. 5, lampu lalu lintas taman sari, jembatan beurawe, dan suzuya. peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer ialah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan.<sup>35</sup> Dimana data yang diperoleh berupa data mentah yang masih harus lanjut lagi. Sumber yang diperoleh dari data primer langsung dari data melalui observasi maupun wawancara yang memiliki kunci informasi dan terkait langsung dengan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Banda Aceh.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah primer.<sup>36</sup> Data yang diperoleh dari data sekunder ini berasal dari kepustakaan berupa buku, jurnal, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang termasuk dalam data sekunder yang berasal dari dokumen yang berkenaan dengan Dinas Sosial Banda Aceh, seperti profil dinas, program kerja dinas dan buku yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Banda Aceh.

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005), hlm. 128

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial...*, hlm. 128

### 3.5. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1	Informan Kunci, mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
2	Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas	1	Informan Kunci, mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
3	Anak Jalanan	3	Informan Utama, mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
4	Orang Tua	3	Informan Utama, mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
5	Masyarakat	2	Informan Tambahan, mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
	Total	10	

Sumber: Di Olah Oleh Peneliti

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi dalam bahasa latin artinya melihat dan memperhatikan. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium dalam konteks eksperimental adalah observasi dalam rangka penelitian kualitatif.

Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah.<sup>37</sup> Dalam hal ini yang peneliti lakukan dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Banda Aceh, baik itu Implementasi Kebijakan, tanggapan masyarakat maupun perannya dalam melakukan penertiban.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau disebut juga narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan secara terbuka melalui percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai dalam penelitian ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rumah Singgah, Anak Jalanan, Orang Tua dan Masyarakat. Pada proses wawancara para responden diberikan kebebasan untuk menjawab. Adapun segala jenis alasan, sikap maupun persepsi dari responden menjadi penguat dalam hasil dari penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 143

<sup>38</sup> M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia: Indonesia Bogor

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan teori-teori, pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak.<sup>39</sup> Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film berupa data yang akan dilihat, ditulis, disimpan dan akan digunakan dalam penelitian. Istilah dokumen juga merujuk pada materi seperti foto, catatan harian, film, memo, video, catatan kasus seperti halnya data kecelakaan dari pihak berwenang dan sebagainya.<sup>40</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data perlu dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh data yang terkumpul akurat, sehingga di akhir kesimpulan dapat dibuat secara akurat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada dengan tujuan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

#### 2. Uji Transferabilitas

---

<sup>39</sup> Sarwono, Jonathan. 2010. Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 34-35

<sup>40</sup> Albi Anggito. Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif*"(Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm.146

Uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Untuk menerapkan uji transferabilitas ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan juga sistematis terhadap hasil penelitian.

### 3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Menguji produk yaitu data, penemuan-penemuan, interpretasi, rekomendasi dan membuktikannya bahwa itu didukung oleh data.

### 4. Uji Konfirmabilitas

Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, dalam arti bahwa bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmabilitas.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Menurut Huberman, analisis data kualitatif merupakan data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam beberapa macam cara seperti observasi, wawancara, dokumen atau rekaman suara, yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yaitu:

1. Tahap reduksi, data dimana peneliti harus dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas serta kemampuan berfikir yang baik.

2. Tahap penyajian, data yang penyajian datanya dilakukan sendiri dengan tujuan agar hasil reduksi tersusun rapi, sehingga memudahkan dalam membangun rencana penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, yang mana penarikan kesimpulan dari sebuah penelitian dalam bentuk visual objek yang selanjutnya tidak diketahui kepastiannya dan berubah menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Yusuf, A. Musi, 2017, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, Cet.4. Hlm 400

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Profil Lembaga Dinas Sosial Kota Banda Aceh



**Gambar 4.1 Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

*Sumber: Website Dinas Sosial Kota Banda Aceh*

##### 4.1.1. Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang sosial. Sebelum adanya Perwal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integritasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan



mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.

#### 4.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang Pariwisata dalam Bingkai Syariah

Misi:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan Kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya penanganan masalah sosial
2. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial
3. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

### 4.1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

#### 1. Tugas

Dinas Sosial merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan social. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

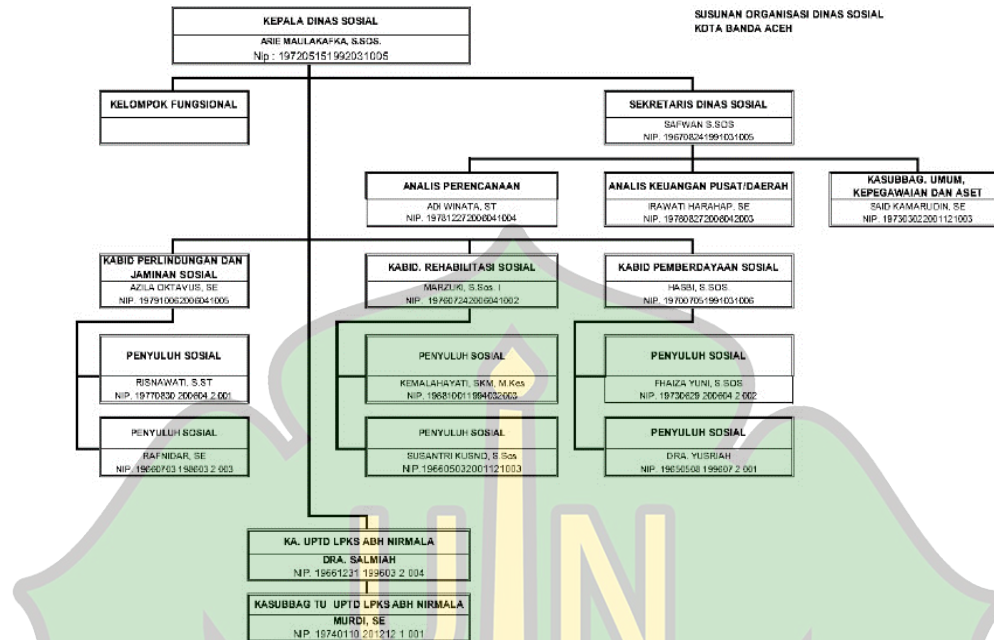
Kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh:

- 1) Penertiban izin pengumpulan sumbangan
- 2) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- 3) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

- 4) Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
- 5) Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemeliharaan anak-anak terlantar
- 7) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- 8) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemeliharaan trauma bagi korban bencana
- 9) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
- 10) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.



#### 4.1.4. Struktur Organisasi



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi**

*Sumber: website Dinas Sosial Kota Banda Aceh*

Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalam sekretaris terdiri dari:

- 1) Kasubag. Umum, kepegawaian dan asset
- 2) Kasubag. Program dan Pelaporan
- 3) Kasubag. Keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggan, hukum.
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

## 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan sosial di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi

- 1) Seksi Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial
- 2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana social, jaminan sosial keluarga
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang rehabilitas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai seksi:

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Korban Penyandang Disabilitas.

2) Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitas sosial anak terlantar, rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin



Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Identifikasi, penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional ota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.
- b. Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan,

penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan

restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relewan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kestiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, penataan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan serta faktor penghambat dalam pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi indikator adalah 1) Standard an Sasaran Kebijakan. 2) Sumber Daya. 3) Hubungan Antar Organisasi. 4) Karakteristik Agen Pelaksana. 5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. 6) Kecenderungan/Disposisi Para Pelaksana.

### **4.2.1. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan**

#### **1. Standard dan Sasaran Kebijakan**

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran yang harus dicapai para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kemalayahati S.KM, M. Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Lansia&Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa:

“sasaran dari kebijakan pembinaan ini sudah sesuai target dimana anak jalanan ini ada perkembangan dari perilaku dan pola pikir mereka sedikit demi sedikit sudah berubah kearah yang lebih baik. yang menjadi sasarannya gepeng, tunanetra, disabilitas, lansia terlantar”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalayahati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

Menurut Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas, mengatakan bahwa dengan adanya pembinaan akan membawa atau adanya perkembangan perilaku anak-anak tersebut adanya perubahan kearah yang lebih baik. Dan sasaran utama ialah menanggulangi perkembangan anak-anak jalanan.

Selanjutnya ibu Kemalayahati S.KM, M.Kes mengatakan tidak hanya anak jalanan yang menjadi sasarannya, tetapi para pelaku yang terlibat akan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

“anak jalanan yang berjualan ini ada yang koordinir dimana mereka ada titik jemputnya seperti dilampu merah dan café-café, yang jemput inilah kita pantau setelah kita ikutin kemudian kita tangkap pelakunya dan pelakunya sudah dimasukkan kepenjara”<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, tidak hanya anak jalanan yang menjadi sasaran dari Dinas Sosial. Tetapi juga oknum-oknum yang mengkoordinasikan anak-anak tersebut juga termasuk menjadi sasarannya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I juga menyampaikan terkait dengan standar keberhasilan dari permasalahan anak jalanan mengatakan:

“berdasarkan standar keberhasilan dari persoalan anak jalanan ini adalah ketika kondisi kota banda aceh bersih dari kehadiran mereka atau minimal adanya pengurangan jumlah signifikan dari keberadaan mereka”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalayahati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

Selanjutnya Bapak Marzuki, S.Sos.I juga menambahkan:

“Program pembinaan dirumah singgah yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial. Pembinaan yang dilakukan berupa materi yang diberikan dalam bentuk ceramah dan diskusi serta materi fisik berupa senam, baris berbaris dan gotong royong”<sup>45</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dan pengumpulan data dan dapat dijelaskan bahwa standardan sasaran kebijakan menurut teori Van Meter Van Hom sudah sesuai sasaran di mana anak jalanan yang telah diberikan pembinaan dan diharapkan adanya perubahan perkembangan kearah yang lebih baik. Standar keberhasilan yaitu tidak hanya anak jalanan yang ditangkap tetapi oknum yang koordinir mereka juga ikut ditangkap.

## 2. Sumber Daya

### a. Sumber Daya Manusia

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja kebijakan dapat diukur melalui kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistik. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standard an sasaran yang harus dicapai para pelaksana kebijakan.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

**Tabel 4.1**  
**Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

JENIS KELAMIN	GOLONGAN									TENAGA KONTRA K	TOTA L	
	II. d	II. c	II. b	III. a	III. b	III. c	III. d	IV. a	IV. b			IV. c
PEREMPUAN	-	-	-	1	1	4	8	3	-	-	12	29
LAKI - LAKI	2	1	2	1	2	-	5	2	1	1	13	30
<b>JUMLAH</b>	2	1	2	2	3	4	13	5	1	1	25	59

*Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh*

Faktor sumber daya merupakan peranan penting dalam implementasi kebijakan. sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Salah satu faktor utama dalam optimalisasi suatu kebijakan adalah unsur pelaksana. Sumber daya manusia atau pelaksana tersebut meliputi staff dan pelaksana yang memiliki keahlian yang diperlukan.

Berdasarkan pada Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) dimana adanya pekerja sosial sebagai sumber daya mendukung keberhasilan dalam melaksanakan suatu implementasi dalam kebijakan ini dimanan adanya ketersediaannya sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan dalam pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal, dengan bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan:

“kesiapan Sumber Daya Manusia sangatlah memadai, mengingat orang-orang yang terlibat dalam urusan ini mereka yang ahli dalam bidangnya serta sesuai dengan ilmu mereka”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Kemalahayati S.KM, M, Kes selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas mengatakan jika dalam pembinaan berlangsung ada pekerja sosial yang mendampingi mereka.

“dalam pembinaan anak jalanan ada pekerja sosial yang mendampingi mereka saat kegiatan berlangsung dari pagi mereka sudah memulai aktifitas seperti senam berolahraga setelah itu mereka juga diajarkan shalat yang benar serta mengikuti pengajian”<sup>47</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anak jalanan N, anak tersebut mengatakan:

“pada saat kami ditangkap sama Satpol PP, kami diceramahin, lalu dibawa kerumah singgah di Lamjabat, pada pagi hari kami dikasi makan dan disuruh bersih-bersih kawasan.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil informasi wawancara di atas maka sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 27 Ayat (2) yang dimana usaha kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, bimbingan agama, mental dan sosial, dan rehabilitas sosial.

#### b. Sumber Daya Finansial

Tidak hanya sumber daya manusia yang diperlukan, sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan N pada tanggal 20 Oktober 2023



memperlancar pelaksanaan suatu kenijakan terbatasnya dana lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil informasi wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, sebagai berikut:

“ketersediaan dana dalam hal pembinaan anak jalanan termasuk dalam katagori cukup mengingat pihak dinas sosiak provinsi aceh juga ikut membantu dalam kegiatan ini”<sup>49</sup>

selanjutnya wawancara dengan Ibu Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitas Sosial Amak, Lansia & Penyandang Disabilitas mengatakan tentang fasilitas yang dimiliki dalam pembinaan anak jalanan

“di rumah singgah itu ada beberapa fasilitas seperti tilam beserta dengan set bantal, lemari, kelambu, piring, gelas, dan sendok, air gallon dll”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu E selaku Orang Tua Anak Jalanan mengatakan:

“selama 3 hari kami ditempat tinggalkan dirumah singgah itu ada fasilitasnya tidak kami bawa sendiri contohnya saja dari bangunan rumah singgah itu sangat layak dan juga ada tempat tidur juga dan barang lainnya”<sup>51</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dan pengumpulan data maka dapat dijelaskan bahwa indicator sumber daya menurut teori Van Meter Van hom berjalan dengan baik karena pihak Dinas Sosial terlibat dalam penanganan pembinaan anak jalanan dan mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu E Orang Tua, pada tanggal 20 Oktober 2023

anak jalanan. tidak hanya sumber daya anggaran tetapi dalam fasilitas juga memadai.

### 3. Hubungan Antar Organisasi/komunikasi

Standar dan tujuan impelmetasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi baik antar instansi lainnya guna menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Dengan adanya koordinasi komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat, maka akan semakin dikit kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan dengan pelaksanaan pembinaan anak jalanan, ada beberapa instansi lain yang terlibat, diantaranya adalah:

Berdasarkan dengan informasi yang didapat oleh Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitas Sosial Lansia&Penyandang Disabilitas, menyampaikan:

“stakeholders yang terlibat dalam kegiatan ini atau yang berhubungan dengan masalah ini kita bekerjasama dengan Dinas Sosial Aceh, Satpol PP, DP3A, dan Polresta kerjasama yang dimaksud ini ialah sama-sama kita dalam satu tim dalam penanggulangan masalah anak-anak”<sup>52</sup>

Kemudian informasi tambahan dari Bapak Marzuki, S.Sos.I menyampaikan tambahan terkait stakeholders yang terlibat

“dalam pembinaan anak jalanan dinas sosial bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh seperti dinas syariat islam, dinas pendidikan dayah, bhabinkamtibnas kecamatan meraxa dan babinsa polsek Meuraxa.”<sup>53</sup>

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Ibu E sebagai Orang Tua dari anak jalan mengatakan:

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

“kami ga pernah di tangkap sama Dinsos tapi kalau sama Satpol PP pernah tros kami langsung dibawa ke Lamjabat Ulhe lhee, kami rehab 3 hari maupun 5 hari”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa adanya kerjasama dari beberapa instansi dalam penanganan masalah sosial ini seperti yang sudah dijelaskan pada hasil wawancara tersebut dan dapat disimpulkan bahwa sudah terjalannya komunikasi yang baik untuk menyukseskan berjalannya pelaksanaan pembinaan anak jalanan.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlinat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cakupan atau luas wilayah kebijakan.

Berdasarkan dengan informasi yang didapat oleh Bapak Marzuki, S.Sos.I menyampaikan terkait dengan apakah dinas sosial sudah melakukan sesuai dengan aturan atau tidak, beliau mengatakan:

“keberadaan dinas sosial dalam menjalankan tugas ini sudah sangatlah tepat mengingat semua kebijakan yang diterapkan sudah diatur oleh kementerian sosial”<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu E sebagai orang tua pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

Selain dari pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peneliti juga mengambil beberapa informan yang bersumber dari masyarakat dengan Bapak Z, beliau mengatakan :

“menurut SOP sudah, tetapi masih kurang dalam monitoring karena masih saya lihat dijalanan masih ada beberapa yang berkeliaran seperti di lampu merah sp. 5 anak-anak yang berjualan “<sup>56</sup>

Kemudian informasi yang di dapat dari Ibu R juga selaku masyarakat menyampaikan pendapat yaitu:

“terkait dengan dinas sosial dalam melaksanakan tugasnya itu masih kurang dikarenakan masih banyak anak-anak jalanan yang berkeliaran dijalanan, saya harapkan agar dinsa lebih memperhatikan masalah-masalah anak yang dijalanan ini.”<sup>57</sup>

Ibu Kemalahayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitas Sosial Amak,

Lansia & Penyandang Disabilitas menyampaikan terkait dengan monitoring:

“setiap hari ini kami kerjasama dengan satpol PP, dari pihak Satpol PP yang melakukan razia tetapi yang menjadi masalahnya ialah karena anak jalanan ini berasal dari Aceh Besar bukan berasal dari Kota Banda Aceh”

Berdasarkan hasil waawancara dengan narasumber berpendapat dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan SOP tetapi masih kurangnya monitoring dikarenakan masih banyaknya anak-anak jalanan yang berkeliaran.

## 5. Disposisi

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan *vefiltered*/penyaringan lebih dahulu dari

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Z selaku Masyarakat Pada tanggal 24 Oktober 2023

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R selaku masyarakat pada tanggal 24 Oktober 2023

persepsi para pelaksana dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi pada pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada 3 unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu pemahaman mereka tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan misalnya penerimaan, netralitas, maupun penolakan, dan intensitas tanggapan tersebut.

#### 1. Komperhensif dan pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman diperlukan dalam suatu implementasi kebijakan secara keseluruhan. Dalam implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ini, pelaksana memahami kebijakan tersebut. Pemahaman dan kesiapan SDM juga sangat memadai, mengingat orang-orang yang terlibat dalam urusan ini mereka yang ahli dalam bidangnya serta sesuai dengan disiplin ilmu mereka.

#### 2. Tanggapan terhadap kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ini masih harus adanya respon dari pemerintah seperti berdasarkan informasi penelitian wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I menyampaikan:

“respon dari penerapan kebijakan ini perlu adanya upaya yang lebih serius lagi dari pihak pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

Kemudian informasi hasil wawancara dari Bapak Z selaku masyarakat berdasarkan tanggapan dengan adanya pembinaan anak jalanan.

“sangat bagus sekali dengan adanya pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinsos ini dikarenakan mereka ini seharusnya ada hak belajar, hak tidak berada dijalanan dan mereka ini pasti memiliki cita-cita tetapi keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu.”<sup>59</sup>

Ibu Kemalhayati S.KM, M.Kes menyampaikan tanggapan terkait orang tua yang tetap mengulangi masalahnya:

“jika mereka ini kedapatan sedang berada dijalanan Dinas Sosial ini akan memanggil dan memberikan efek jera kepada orang tuanya dan memberikan sosialisasi kepada orang tuanya agar mereka tidak berada dijalanan dan tidak mengulangnya.”

### 3. Intensitas tanggapan

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reaksi Cepat melakukan giat penjangkauan dan pengamanan terhadap gelandangan dan pengemis di seputaran warung kopi dan café-café yang berada diwilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dala Wilayah Kota Banda Aceh, yaitu: setiap orang dilarang menadi gelandangan dan pengemis, setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis dan setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada tuna sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memberikan penghargaan kepada warung kopi atau café yang berada di wilayah Kota

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Z selaku Masyarakat Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Banda Aceh yang tidak memberikan sumbangan atau memberikan uang kepada mereka, penghargaan ini di tanda tangani oleh Walikota.

Berdasarkan informasi penelitian wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I juga menyampaikan:

“respon dari penerepan kebijakan ini perlu adanya upaya yang lebih serius lagi dari pihak pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan membuka lebih banyak lapangan kerja”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam pembinaan anak jalanan sudah cukup baik tetapi masih harus adanya upaya atau respon lebih dari pemerintah agar tercapai peningkatan kesejahteraan sosial pada anak.

#### 6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan public dalam perspektif yang ditawarkan olen Van Meter dan Van Horn adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup sosial, enomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

Untuk mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, peneliti melakukan waawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

“keberadaan anak jalanan sangat mempengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi mengingat tampak jelas angka kemiskinan dan pengangguran di kota banda aceh”<sup>61</sup>

Selanjut juga ibu Kemalabayati S.KM, M.Kes selaku Kasi Rehabilitas Sosial Lansia&Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan tambahan, berikut pernyataannya:

“pengaruh sosial masyarakat juga sangat penting, kerana masih banyak masyarakat yang merasa kasihan dengan adanya mereka berada dijalanan, dan juga tidak heran karena sering dikasihani mereka menjadi keenanakan dan kurang berusaha menjadi yang lebih baik.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu R selaku masyarakat terkait dengan adanya peraturan yang mengatakan dilarang memberikan sumbangan kepada tuna sosial:

“tau terkait dengan peraturan tersebut tetapi kita juga terkadang merasa kasihan sehingga memberikan seikhlasannya”

Dari penjelasan di atas, untuk menjalankan kebijakan dengan baik harus adanya lingkungan yang mendukung terutama kondisi sosial pada masyarakat sehingga mereka yang sebagai anak jalanan tidak lagi bertahan dengan profesinya tersebut.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalabayati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023



#### 4.2.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak

##### Jalanan

Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Banda Aceh:

##### 1. Keluarga (orang tua)

Faktor ekonomi yang kuat dapat memaksa orang tua atau kerabat anak jalanan untuk memaksa mereka mencari nafkah, bahkan jika itu berarti mereka harus bekerja di sektor yang berbahaya atau rawan. Meskipun orang tua menyadari bahwa tindakan mereka merampas hak-hak anak, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan ekonomi yang sulit. Selain itu juga, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak-anak untuk menjadi pengamen, penjual asongan, dan pekerja jalanan lainnya, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak P selaku orang tua mengatakan:

“pekerjaan saya sebenarnya kuli tapi karena lagi gada kerjaan saya kerja seperti ini mengamen aja, alasan saya bawa anak dan istri juga biar mereka tidak bosan aja dirumah”<sup>63</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu I sebagai orang tua juga mengatakan:

“saya bawa anak karena ini hari libur biasanya juga anak saya ini masih sekolah karena libur dia juga mau ikut saya.”<sup>64</sup>

Petikan wawancara dengan S salah satu anak jalanan, Menyampaikan:

“saya berjualan Koran ini karena sedang libur sekolah sekalian ikut dengan mamak, kami belum pernah ditangkap tapi cuman dikasih

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak P Selaku Orang Tua pada Tanggal 20 Oktober 2023

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan ibu I selaku Orang Tua pada tanggal 10 Desember 2023

peringatan aja jangan berjualan lagi seperti ini karena dibilang lebih baik saya sekolah saja”<sup>65</sup>

Petikan wawancara dengan informan dengan F salah satu anak jalanan,

“kami ikut dengan mamak kak karena dirumah kan juga tidak ada yang menjaga kami.”<sup>66</sup>

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari Ibu Kemalahayati S.KM, M. Kes selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Lansia&Penyandang Disabilitas mengatakan:

“banyak orang tua ini tidak mau anaknya dipisahkan dari mereka, kekmana pun anaknya bekerja karena mereka ada hasilnya uang sehingga mereka tidak mau anaknya dititip oleh rumah singgah”<sup>67</sup>

Dari jawaban informan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor paling penting yang mempegaruhi proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ialah dari pihak keluarga dan dari anak jalanan tersebut. Karena kurang perhatian orang tua yang seharusnya memberi nafkah malah anak yang membantu untuk ikut mencari nafkah.

## 2. Mental yang sulit dirubah

Faktor penghambat dari lingkup eksternal dalam menangani anak jalanan yaitu anak jalanan itu sendiri. Kebiasaan atau mental mereka yang sangat sulit dirubah walaupun sudah diberikan pembinaan mereka tetap saja kembali menjadi anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marzuki S.Sos.I selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan:

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan S selaku Anak Jalanan pada tanggal 10 Desember 2023

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Z Selaku Anak Jalanan pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia&Penyandang Disabilitas, pada tanggal 2 Oktober 2023

“hambatan yang sangat signifikan kembalinya mereka kejalanan dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka tetapi jika dari mereka yang sudah pernah mendapatkan pembinaan dan dibebaskan kemudian mereka tezarang razia lagi mereka akan dilakukan pembinaan yang lebih tinggi lagi dengan cara dikirim ketempat pembinaan yang berada di Ladong Aceh Besar milik Dinas Sosiak Provinsi Aceh”<sup>68</sup>

Selanjutnya wawancara dengan anak jalanan berisial N mengatakan:

“iya kami pernah ditangkap sama satpol pp terus dibawa ke rumah singgah yang beralamat dilamjabat, kami balek lagi kejalanan ya karena ikut orang tua karena dirumah gaada yang jaga kami.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kembalinya mereka kejalanan karena beberapa faktor juga karena kebutuhan mereka untuk tetap hidup dijalanan yang mengakibatkan kembalinya mereka ke jalanan.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada tanggal 8 November 2023

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan N selaku Anak Jalanan pada tanggal 20 oktober 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan ini telah memenuhi sebagian indikator diantaranya: *Pertama*, Standar dan Sasaran dimana anak jalanan yang diberikan pembinaan sudah adanya perkembangan yang lebih baik dengan standar keberhasilan diinginkan adanya pengurangan jumlah dari keberadaan anak jalanan. *Kedua*, sumber daya sudah terpenuhi dimana adanya pekerja sosial dalam membina anak jalanan dan tersedianya fasilitas dalam pembinaan. *Ketiga*, hubungan antar organisasi sudah berjalan dengan baik dimana adanya komunikasi dan stakeholders yang bekerjasama seperti Satpol PP, DP3A dan Polresta. *Keempat*, karakteristik agen pelaksana dimana dalam hal menjalankan tugasnya sudah sesuai aturan tetapi masih terdapat kurangnya monitoring. *Kelima*, Disposisi dalam hal ini masih harus adanya upaya lebih dari pemerintah agar tercapainya kesejahteraan sosial pada anak jalanan. *Keenam*, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dalam hal ini sangat mempengaruhi dan masyarakat harus iku berperan aktif agar permasalahan anak jalanan ini tidak bertambah.

2. Adapun faktor penghambat dalam mengatasi permasalahan ini banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan yaitu antara lain dari; yaitu: 1) orang tua atau keluarga dimana anak jalanan ini disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja agar mendapatkan uang ada pula anak jalanan yang ikut dengan orang tua dikarenakan mereka tidak ada yang menjaga dirumah; 2) mental pribadi yang sulit dirubah dimana banyak anak yang sudah mendapatkan pembinaan kembali ke jalanan.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis bermaksud memberikan saran terhadap implementasi atau pelaksanaan terhadap pembinaan anak jalanan kota banda aceh yang akan dilaksanakan mendatang:

### Dinas Sosial

- a. Dinas Sosial harus lebih tegas dalam memberikan aturan bagi para oknum yang ingin menebus anak-anak jalanan yang tertangkap agar tidak terurung lagi kegiatan mempekerjakan anak.
- b. Dinas sosial harus memberikan pembinaan yang tepat sasaran agar bisa terbina dengan baik.
- c. Harus adanya regulasi khusus dalam menangani pembinaan anak jalanan
- d. Memberikan sanksi tegas agar tidak kembali ke jalanan

### Orang Tua

- a. Orang tua harus mengetahui apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang figur orang tua bagi anak-anaknya
- b. Orang tua harus mampu sekuat tenaga memenuhi kebutuhan pokok dan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak.

## Masyarakat

- a. Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak.
- b. Masyarakat harus berani bertindak apabila terlihat kegiatan anak jalanan yang dilakukan oleh oknum segera melaporkan kepihak berwajib.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Clolid Narboku. 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik model Van Meter dan Van Horn: The Policy.
- AG. Subarsono, 2005, "Analisis Kebijakan Publik", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Albi Anggito. Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm.146
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosia: Format 2 Kualitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005), hlm. 128
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosia..., hlm. 128
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004) Departemen Sosial RI, *Intervensi Psikososial*. (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 20
- Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia: Transisi Manuju Demokrasi, Cer. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm: 295
- Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 N0. 1 Thn, 2010



Hambali, "Hak Anak Atas Pendidikan; Pemenuhan Hak dan Solusinya (Dimulai dari pendidikan Keluarga dan aktivitas Sederhana)", Jurnal Paradigma, XII (24) Juli-Desember 2007, IKIP Budi Utomo Malang, hlm. 153

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 143

Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh* (JIM: Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2 No. 4 November 2018)

Joan Freeman & Utami Munandar. 1996. *Cerdas dan Cemerlang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia: Indonesia Bogor

Miftha Thoha, *Pembinaan organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 7

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant, 2004. *Publik Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia. Hlm 158-160

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Hlm. 152

Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmia-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 34-35

Sutrisno, Edy, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 132

Johan Narutama, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karangayar, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 19

Winarno, Budi, 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo Hlm. 102

Yusuf, A. Musi, 2017, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, Cet.4. Hlm 400

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial

## LAMPIRAN

### Lampiran I : Wawancara



Wawancara dengan Ibu Kemalahayati, S,KM, M.Kes Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan Disabilitas



Wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Sos.I Kepala Bidang Rehabilitas Sosial



Wawancara dengan Anak dan Orang Tua



Wawancara dengan Anak dan Orang Tua



Wawancara dengan Orang Tua




Wawancara dengan Masyarakat



Waawancara dengan Masyarakat



## Lampiran II : Surat Keterangan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 947/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PFR 50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 April 2023**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara :

1. Cut Zamharira, B.P., M.AP. Sebagai pembimbing I

2. Hijrah Saputra, S.Pd., M.Sos. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi

Nama : Cahya Naimah Syahidati

NIM : 193321370


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

KEDUA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 15 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

  
MUJI MULIA

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

### Lampiran III: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1802/Un. 08/FISIPI/PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Cahya Naimah Syahadati / 190802070

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jl. Usman Ahmad No 2 Dusun Ujong Meunasah, Lhong Cut, Banda Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 29 Februari  
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran IV: Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### Identitas Diri

Nama : Cahya Naimah Syahadati  
 Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Februari 2002  
 Nomor handphone : 082268035964  
 Alamat : Jln. Usman Ahmad No 2 Dusun Ujong Meunasah,  
 Lhong Cut, Banda Aceh  
 Email : [190802070@student.ac.id](mailto:190802070@student.ac.id)

#### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 25 Banda Aceh  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 9 Banda Aceh  
 Sekolah Mengengah Atas : SMA Negeri 3 Banda Aceh

#### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B (2021) Ma'had Al-Jamiah  
 TOAFL :410 (2023) Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry  
 Komputer :B (2023) Pusat Bahasa Uin Ar-Raniry  
 Magang : A (2022) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas  
 Penduduk